



SPPG Dihentikan Sementara

● Buntut Dugaan Keracunan MBG di SMA 1

YOGYA, TRIBUN - Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta serta instansi terkait masih melakukan penelusuran sumber dugaan keracunan di SMA 1 Yogyakarta.

Karegional SPPG DIY, Gagat Widyatmoko mengatakan, sudah dilakukan pengambilan sampel makanan dan data ke-

sehatan siswa untuk pemeriksaan laboratorium. Sebagai langkah cepat tanggap, BGN telah menginstruksikan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah terdampak. "Langkah ini diambil untuk memberi

● ke halaman 7

SPPG Dihentikan

• Sambungan Hal 1

ruang evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan guna memastikan keamanan pangan di lingkungan sekolah," katanya, kemarin.

Dia melanjutkan, berdasarkan kuesioner dari pihak sekolah, ada 426 siswa yang mengalami gejala diare. Data ini masih bersifat laporan awal dan sedang diverifikasi lebih lanjut oleh tim lapangan bersama dinas kesehatan.

Hingga saat ini, tidak dapat laporan siswa yang dirujuk atau dirawat di fasilitas kesehatan akibat dugaan kejadian tersebut. Kegiatan belajar mengajar (KBM) kemarin berjalan normal, dan tidak ada kebijakan pemulangan siswa lebih awal," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan DIY, Akhmad Akhadi menerangkan pihaknya belum bisa memastikan makanan yang menjadi penyebab keracunan. Menurut dia, jika terjadi keracunan, maka seluruh makanan yang dikonsumsi patut diduga menjadi penyebab keracunan.

Dalam MBG yang dikonsumsi, Rabu (15/10) lalu, ada dua jenis protein, yaitu ayam dan tahu. Keduanya berisiko mengalami penurunan kualitas jika waktu penyimpanan melebihi ambang, proses pengolahan, cara mengolah dan mengemas yang kurang tepat.

Desakan
Jogja Corruption Watch (JCW) menilai, insiden ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kecelakaan biasa dan mendesak agar publik serta penegak hukum mengambil langkah tegas. Depati Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, menegaskan bahwa berulangnya kasus keracunan dalam program MBG merupakan tanda lemahnya sistem pengawasan pangan di DIY. "Ini bukan pertama kalinya terjadi di Yogyakarta, sehingga harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas. Niat baik pemerintah tidak cukup bila keamanan pangan acap kali diabaikan," ujarnya, Jumat (17/10).

Menurut Kamba, dugaan



KENDURI - Peserta aksi Kenduri Suara Ibu berdiskusi di Bundaran UGM merespons kasus keracunan MBG, Jumat (17/10).

keracunan massal akibat menu MBG bukan sekadar kecelakaan, tetapi menunjukkan sistem pengawasan pangan yang rapuh, la menilai, kejadian ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi penyedia program, khususnya pihak penyelenggara penyedia pangan gratis (SPPG). "Hukum kini dituntut hadir, bukan sekadar menyalah atau memberikan 'omon-omon' sanksi bagi pihak yang lalai. Jika ada unsur kelalaian dalam pengadaan, pengolahan, atau distribusi makanan, maka penyelenggara atau vendor catering harus bisa dijerat secara pidana maupun perdata," tegasnya.

Kamba menjelaskan, Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pihak yang lalai hingga menyebabkan orang lain sakit. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberi ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Selain jalur pidana, publik juga dapat menempuh gugatan perdata, baik secara individu maupun melalui *class action*, apabila merasa dirugikan. "Pasal 1365 KUHP-Perdata memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut ganti rugi. Ini bukan hanya hak, tapi juga cara untuk menegakkan tanggung jawab publik atas program yang dibayar uang negara," urai Kamba.

Meski demikian, JCW menilai langkah hukum bukan satu-satunya solusi. Pemerintah daerah dan penyedia

program perlu memperbaiki sistem pengawasan, menerapkan sanksi tegas, serta memastikan keamanan makanan melalui standar yang ketat. "Jika tiga hal itu tetap diabaikan dan kasus MBG beracun terus berulang, maka sudah saatnya program ini dievaluasi total, bahkan dihentikan," ujar Kamba.

Solidaritas
Massa Kenduri Suara Ibu Indonesia kembali menggelar aksi damai di bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (17/10) untuk mendesak penghentian program MBG. Berbeda dari aksi sebelumnya, massa Kenduri Suara Ibu Indonesia mengemas unjuk rasa ini dalam bentuk diskusi. Mereka juga membawa tikar masing-masing sebagai simbol solidaritas para orang tua murid. "Tuntutan kami hari ini tetap sama, yaitu untuk menghentikan program MBG yang sentralistik dan militaristik," kata koordinator aksi, Gernattil, kepada awak media.

Aksi kali ini lebih kepada diskusi dari perspektif orang tua, akademisi dan komunitas independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang merupakan pusat kajian bersama dengan jaringan lain membuat *platform* penantian secara independen. "Nah, harapan kami dari *platform* ini nanti orang tua atau siswa bisa *melakukan* secara langsung jika mengalami kondisi-kondisi yang tidak ideal ketika mendapatkan MBG," ungkapnya. "Tetapi seruan kami hari ini sama, kami menginginkan supaya program ini dihentikan untuk

dievaluasi. Jadi dievaluasi, tapi sebelumnya dihentikan dulu, tidak dievaluasi sambil jalan," sambung Gerna.

Desakan ini semakin menguat sekuat 400 lebih siswa di SMA Kota Yogyakarta mengalami gejala keracunan akibat menyantap menu MBG. Dia berharap para orang tua harus bergerak merespons kejadian yang merugikan akibat MBG dengan cara melapor ke *platform* CELIOS. "Itu nanti dibuat semudah mungkin untuk diisi dan dilaporkan. Untuk pelaporannya juga bebas. Terutama yang mendapatkan MBG, ya, bisa orang tua, siswa, guru. Dan kerahasiaan dijamin, jadi identitas pelapor juga dijamin kerahasiaannya dalam *platform*-nya," tegas dia.

Gerna menyebut aksi Kenduri Suara Ibu Indonesia ini merupakan yang ketiga kalinya digelar. Namun apabila pemerintah tak kunjung merespons aksi tersebut, tidak menutup kemungkinan aksi lanjutan akan dilaksanakan. "Keprihatinan kami masih sama, MBG ini tetap berlanjut meskipun sudah banyak sekali kasus keracunan. Jadi selama pemerintah tidak mendengarkan tuntutan kami, kami masih akan tetap melakukan kenduri," ujarnya.

Gerna menyebut program MBG benar-benar sentralistik. Karena penanggungjawabnya adalah pemerintah pusat langsung. Jadi, pemerintah daerah tidak akan bisa banyak berbuat jika kemudian mendapatkan komplain dari para penerima MBG tersebut. (*mawhan/hda*)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Walikota 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005